

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Dahri Adi Patra¹, Lanteng Bustami², Hasriani³

¹⁾ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
^{2,3)} Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan atau staf yang berada dinas kehutanan kabupaten luwu kota belopa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (Kuisisioner) yang disebar kepada responden atau karyawan di dinas kehutanan kabupaten luwu. dari total 25 kuisisioner yang disebar, hanya 20 kuisisioner dari responden yang kembali dan dapat diolah.

Teknik pemilihan sampel yaitu non probability sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi rank spearman pada taraf signifikan 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan statistical package for social sciences (SPSS) Ver.19.00.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi rank spearman menunjukkan nilai koefisien korelasi rank spearman sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, menunjukkan hasil 2,818 hasil perbandingan nilai t hitung t tabel sebesar 2,068. Dari hasil pengujian tersebut t hitung $> t$ tabel yaitu 2,818 $>$ 2,068 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan reformasi di segala sektor pemerintahan termasuk yang di tandai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka tuntutan sampai besar kepada sektor publik termasuk pemerintah daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang di terima dari masyarakat. Dalam pengelolah dan masyarakat maka ilmu Akuntansi paling cepat dapat diterima sebagai salah satu alat/media yang dapat di gunakan untuk dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas dimaksud, melalui suatu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2004 dan selanjutnya di ganti dengan PP NO 71 Tahun 2010.

Penerapan Sistem Akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang di tandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan terhadap hukum dan pada akhirnya di wujudkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi kreteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan di bandingkan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tatakelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), Rohman menjelaskan dalam modul LAN 2000 bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh (*Lembaga Administrasi Negara, 2000*). Salah satu cara yang di tempuh pemerintah, adalah dengan menerbitkan perangkat/peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Hal di atas diperkuat dengan telah di lakukannya reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan di tetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan (*Fajar, 2010*).

Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat di

lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk sektor pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (*IHPS*) I tahun 2011 (www.bpk.go.id) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010 menggambarkan kenaikan dari hasil opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian dibanding tahun-tahun sebelumnya hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun badan pemeriksa keuangan masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (*Roviyantie, 2010*).

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, Kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidak efektifan. Dari hasil audit pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah selama 7 tahun, dari 2004-2010, badan pemeriksa keuangan memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam presentase yang lebih besar atas laporan keuangan pemerintah daerah (*LKPD*).

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan populasi diatas, peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua karyawan yang berada di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu. Namun, peneliti hanya mengambil sampel pada karyawan atau staff yang berada di bagian akuntansi atau keuangan saja. Hal ini dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada sistem akuntansi keuangan yang digunakan tentunya oleh bagian keuangan di dinas Kehutanan Kabupaten Luwu tersebut. Dari jumlah populasi sebanyak 112 orang peneliti mengambil sampel sebanyak 25 responden dari 4 bidang dibagian keuangan. Dari 25 kuisisioner yang disebar ke 25 responden yang berada di bagian staff keuangan, hanya 20 kuisisioner yang kembali dan dapat diolah untuk pengujian hipotesis.

Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *product moments pearson* sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien Korelasi
 n = Jumlah Responden
 Y = Jumlah Skor Total Seluruh Item Yi
 X = Jumlah Skor Tiap Item Xi

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian di hitung nilai t hitung untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebaga berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Jumlah data variabel yang memilih rank yang sama

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Setelah nilai t hitung di peroleh, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t hitung tersebut dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk)=n-2 kaidah keputusannya adalah :

- Jika t hitung > t tabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- Jika t hitung \leq t tabel, maka alat ukur instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah. Uji validitas terhadap item-item pernyataan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data *software spss ver.19*.

Namun dalam penelitian ini skala pengukuran untuk uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r hitung atau nilai yang dihasilkan pada uji realibilitas yaitu pada kolom Corelation Item-Total dengan nilai yang dihasilkan r tabel. Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka terbentuk hipotesis, sebagai berikut :

- Ho : r hitung > r tabel, maka butir pernyataan pada kuisisioner dinyatakan valid
- Ha : r hitung < r tabel, maka butir pernyataan pada kuisisioner dinyatakan tidak valid.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Realibilitas

Realibilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	15

Dari tabel diatas nilai realibilitas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebesar 0,896 nilai ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena $r > 0,99$ sehingga variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.

Analisis Koefisien Korelasi Rank perman

Dari tabel 1.12 diatas diketahui nilai koefisien korelasi *rank sperman* sebesar 0,506 nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada di antara $0,40 < 0,506 < 0,599$ serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya (sugiyono : 2005).

Analisi Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui

Spearman's Rank of X Correllationt Coefficient	Rank of X	1,000	,506**
	Sig.(2-talled N	20	,010
Rank of Y Correllationt Coefficient	Rank of Y	,505**	1,000
	Sig.(2-talled N	,010	20

besarnya dari pengaruh variabel bebas (sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan).

Koefisien determinasi ini dapat dihitung

dengan menggunakan rumus :

$$kd = r_s^2 \times 100\%$$

$$kd = 0,506^2, \times 100\% = 25,6\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kata lain masih ada variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara t hitung dengan t tabel yang terdapat dalam tabel distribusi t. Adapun taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - 2$.

Pengujian hipotesis ini digunakan uji statistik uji t, untuk mengetahui t hitung dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = r_s \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = 0,506 \frac{\sqrt{20-2}}{\sqrt{1-0,506^2}}$$

$$t = 2,05 (t \text{ Hitung})$$

Dan untuk pengujian t tabel diperoleh sebagai berikut :

$$t \text{ tabel} = t (\alpha; df) = (0,05; 18) = 2,068$$

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 dan H_a diterima. Artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah.

Dari hasil pengujian t hitung diatas didapat nilai 2,818 dimana t_{tabel} 2,068 sehingga t_{hitung} 2,818 > 2,068 t_{tabel} dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pembahasan

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas kehutanan kabupaten luwu

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah pada pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati/wali kota yang mengacu pada

pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan diatur dengan peraturan menteri akuntansi keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dinas kehutanan kabupaten luwu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu termasuk kedalam kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 2 indikator yang terdiri dari :

Prosedur Belanja Daerah (Pengeluaran)

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan prosedur belanja daerah. Karena sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan garis kontinum pada gambar 1.1 jumlah skor total tanggapan responden tentang kesesuaian tentang sistem akuntansi keuangan dengan belanja daerah dari 9 pernyataan diperoleh dari total skor aktual 931 dan total skor ideal 1080 dengan persentase 88% dan rata-rata skor 4,4. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang prosedur belanja daerah adalah sangat baik. Jadi

dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu sudah sesuai dengan prosedu belanja daerah.

Prosedur Pendapatan Daerah (Penerimaan)

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan prosedur pendapatan daerah. Karena sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan garis kontinum pada gambar 1.2 jumlah skor total tanggapan responden tentang kesesuaian tentang sistem akuntansi keuangan dengan pendapatan daerah dari 6 pernyataan diperoleh dari total skor aktual 648 dan total skor ideal 720 dengan persentase 88% dan rata-rata skor 4,4. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang prosedur pendapatan daerah adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu sudah sesuai dengan prosedu pendapatan daerah.

Laporan Keuangan Harus Relevan, Andal, Dapat dibandingkan Dan Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

- a. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi mendapatkan nilai sebesar 3,5 dan berada pada garis kontinum

baik, yang berarti laporan keuangan pada dinas kehutanan kabupaten luwu sudah dikatakan baik karena sudah andal dalam penyajian jujur, kesalahan material, sesuai fakta dan dapat diverifikasi.

- b. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka di masa lalu mendapat nilai sebesar 4,1 dan berada pada garis kontinum baik, yang berarti kualitas laporan keuangan pada dinas kehutanan kabupaten luwu sudah dapat membantu mengevaluasi kejadian di masa lalu serta membantu memprediksi kejadian di masa yang akan datang.
- c. Dapat Dibandingkan
Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama mendapat nilai sebesar 3,9 yang berada pada garis kontinum baik, berarti laporan keuangan pada dinas kehutanan kabupaten luwu dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan di dinas

kehutanan kabupaten luwu maupun pengguna eksternal.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dapat dilihat pada pengujian hipotesis diatas taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha=0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df=n-2$. Menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,818, sedangkan untuk nilai t tabel sebesar 2,068 jika dilihat dari hasil perbandingan nilai t hitung dan t tabel sebesar $2,818 > \text{nilai t tabel } 2,068$. Dengan kata lain, apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh

karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik. Namun hal ini juga harus di dukung dengan sumber daya manusia yang baik agar mampu mengoprasikan dan memahami sistem akuntansi keuangan yang digunakan. Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggung jawaban saja, namun laporan keuangan juga dijadikan ukurankinerja suatu instansi tersebut. Laporan keuangan juga dijadikan sebagai dasar bahan pertimbangan keputusan, untuk itu pentingnya laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang sudah memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel penelitian

yang di gunakan adalah variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen yang di gunakan adalah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi *rank spearman* dengan program *package for social sciences* (SPSS) *ver.19.00*. Subyek penelitian ini adalah Dinas kehutanan kabupaten luwu kota belopa tahun 2015. Dari total kuisisioner yang disebar sebanyak 25 kuisisioner dan kuisisioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 20 kuisisioner.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Metode analisis korelasi *Rank Spearman* dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dinas kehutanan kabupaten luwu, provinsi sul-sel, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu termasuk kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah yang terbagi kedalam 2 indikator yang terdiri dari 15 pernyataan, dari indikator yang pertama menunjukkan hasil mean skor 4,4 sedangkan indikator yang kedua menunjukkan hasil 4,4. Dari kedua indikator tersebut, nilai mean skor berada pada interval 4,2-5 yang berarti masuk kedalam kategori sangat baik. Artinya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur anggaran belanja daerah dan prosedur anggaran pendapatan daerah. Secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah termasuk kategori sangat baik. 2) Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan pada dinas kehutanan kabupaten luwu, provinsi sul-sel, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu termasuk kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yang terbagi kedalam 1 indikator yang terdiri dari 10 pernyataan, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laporan keuangan pemerintah daerah, nilai mean skor sebesar 3,9 berada pada interval 3,4-4,2 yang berarti masuk kedalam kategori sangat baik. Artinya laporan keuangan sudah memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan kabupaten luwu merupakan laporan keuangan yang berkualitas. 3) Berdasarkan hasil pengujian didapat nilai koefisien korelasi *rank spearman* sebesar 0,506 nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$. Sedangkan berdasarkan hasil uji perbandingan nilai t hitung dan t tabel didapat nilai t hitung s tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuanganebesar 2,818 dimana t tabel 2,068 sehingga t hitung $2,818 > 2,068$ t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2004. *Akuntansi Sekor Publik. Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.

- Bastian, Indra 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI, Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2011, <http://www.bpk.go.id>, 2 Juni 2012.
- Halim, Abdul. 2002. *Accounting Prinsiple Board*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Fajar, Adrianus. 2010 *Pengaruh penerapan sistem akuntansi keungan daerah terhadap kualitas laporan keuangan,*
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi sektor pablik*. Yokyakarta:
- Mardiasmo.2004. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yokyakarta
- Mardiasmo.2002. . *Akuntansi sektor pablik*. Yokyakarta
- Sugiyono. 2005 *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta : Bandung. Indra Bastian
- Roviyantie,2011. Pengaruh kompotensi sumber daya manusia dan penerapan sistem